



RENCANA AKSI KEGIATAN (REVISI)

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM
2020-2024**

***DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI***

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekejarantinaaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan revisi untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK (Revisi) tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Bidang dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.



Baran
Kepala
Juli 2022

dr. Achmad Farchanny T.A, MKM
IP 196902192002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
A. Visi dan Misi	4
B. Tujuan	5
C. Sasaran Strategis	6
D. Indikator Kinerja	7
E. Arah Kebijakan dan Strategi	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN ,STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	
A. Kerangka Logis	12
B. Rencana Kegiatan	13
C. Kerangka Kelembagaan	21
D. Kerangka Regulasi	22
E. Kerangka Pendanaan	23
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI & PENGENDALIAN PROGRAM	
A. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Program	25
BAB V PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator KKP Tahun 2020-2024	7
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan dan Target Kinerja.....	13
Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan.....	12
Gambar 3.1 Cascading IKP & IKK	13
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 telah berakhir, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah berhasil mencapai target kinerja dengan baik, nilai perolehan hasil evaluasi SAKIP rata-rata dalam kurun lima tahun berada diatas 90 (AA). Untuk Kinerja 2021 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RAK tahun 2020 - 2024, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam mendapatkan nilai evaluasi SAKIP sebesar 72,25 (BB).

Tujuh indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dinyatakan berhasil memenuhi target meliputi Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan 102,65%, Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan Lingkungan 105,26%, Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara 110,44%, Nilai Kinerja Anggaran 102,47%, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 105,28%, Kinerja implementasi WBK satker 103,79%, Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 106,12%.

Awal tahun 2022 krisis kesehatan pandemi wabah SARS-CoV-2 (COVID- 19) mulai menurun yang berdampak pada lalu lintas orang dan alat angkut di seluruh negara di dunia sehingga harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumberdaya untuk mengatasi wabah Covid-19. Perubahan alokasi anggaran dan kegiatan terkait peningkatan jumlah kasus SARS-CoV-2(COVID-19) lebih dititikberatkan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut dan barang di pintu masuk dan keluar.

B. Potensi dan Tantangan

1. Sumber Daya Manusia

Tingginya mobilisasi kedatangan dan keberangkatan penumpang dan alat angkut khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia (90 pegawai). Keterbatasan jumlah pegawai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dimana beban kerja yang diterima lebih tinggi dari biasanya. Usulan penambahan Pegawai melalui mekanisme Analisa Beban Kerja sudah dilaksanakan dan untuk saat ini tenaga perbantuan (honorar) perlu dilakukan

penambahan. Adapun sementara ini KKP Kelas I mendapat tambahan tenaga perbantuan Kader Satgas untuk ditempatkan di pelabuhan – pelabuhan wilayah kerja KKP Kelas I Batam sebagai tenaga swabber dan tenaga penerimaan penumpang di pelabuhan.

2. Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi yang cepat dikarenakan situasi pandemi berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan KKP Kelas I Batam, khususnya untuk kegiatan deteksi dini dan respon di pelabuhan dan bandara. Adanya tuntutan regulasi terutama untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan yang belum memadai dan pembiayaan karantina yang belum tersedia bagi pelaku perjalanan sehingga implementasi regulasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program

Upaya penanggulangan pandemi yang dilakukan di pelabuhan dan bandara tidak dapat dilakukan oleh KKP Kelas I Batam saja, akan tetapi diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan semua lintas sector dan lintas program di pelabuhan dan bandara baik pemerintah pusat / daerah maupun swasta. Dibutuhkan advokasi dan sinkronisasi kegiatan dan anggaran dengan semua lintas sektor dan lintas program yang terlibat.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan RI yang baru Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi berikut:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam didukung sumber daya manusia sejumlah 90 Pegawai ASN dan berdasarkan jabatan struktural terdiri dari 1 orang Eselon II/b dan 1 orang Eselon IV/b. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Jabatan Administrasi sebanyak 1 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 67 orang dan Jabatan Pelaksana sebanyak 21 orang. Berdasarkan tingkat Pendidikan tingkat SD sebanyak 1 orang, D-III sebanyak 26 orang, D-IV sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 47 orang, S2 sebanyak 15 orang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. **Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
2. **Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
3. **Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
4. **Peningkatan Sumber Data Manusia.**

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko diwilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator KKP Tahun 2020-2024

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024, KKP telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. **Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN**

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. **Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.**

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN

Indikator yang memberikan gambaran statistik pengendalian faktor risiko di pintu masuk, persentase capaian menunjukkan tingkat pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

4. Nilai kinerja anggaran

Indikator ini merupakan indikator yang memberikan gambaran nilai penyerapan anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi yang dihitung dengan formula rata geometrik melalui aplikasi SMART DJA, peningkatan capaian indikator ini menunjukkan nilai kinerja anggaran lebih baik.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Kinerja implementasi WBK merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan Penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan capaian indikator ini menunjukkan nilai kinerja implementasi WBK yang lebih baik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang memberikan gambaran persentase jumlah pegawai yang memperoleh peningkatan kapasitas 20 JPL, peningkatan capaian indikator ini menunjukkan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik..

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan melaksanakan 6 (enam) pilar Transformasi Kesehatan yaitu :

1. Transformasi Layanan Primer : Mencakup upaya promotif dan preventif
2. Transformasi Layanan Rujukan : Perbaikan mekanisme dan peningkatan akses

rujukan

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan : Respon cepat dalam menghadapi KLB/wabah/kedaruratan kesehatan masyarakat; Penguatan surveilans dan sistem penanganan bencana serta kedaruratan kesehatan
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan : Jaminan ketersediaan biaya yang transparan, efektif, efisien dan berkeadilan
5. Transformasi SDM Kesehatan : Jaminan ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan : Integrasi dan pengembangan sistem data, aplikasi dan ekosistem kesehatan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni menguatkan deteksi, pencegahan dan respon penyakit - faktor risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerjasama lintas sektor dan program
2. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
3. Perluasan Cakupan Layanan Pengendalian Faktor Risiko di Pintu masuk negara
4. Peningkatan Kapasitas SDM
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Untuk mencapai indikator Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN dilakukan strategi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor dan lintas program
 - b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana deteksi dini
 - d. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi

2. Untuk mencapai indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 - a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
 - b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN
 - a. Peningkatan Inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit serta faktor resiko.
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
 - c. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko

4. Untuk mencapai indikator Nilai kinerja anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
 - b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan anggaran
 - c. Melakukan rekonsiliasi atas realiasi APBN
 - d. Monitoring evaluasi antara rencana penarikan dan realisasi penarikan dana

5. Untuk mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut :
 - a. Monitoring dan evaluasi pagu anggaran kontraktual
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan penyediaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tagihan APBN

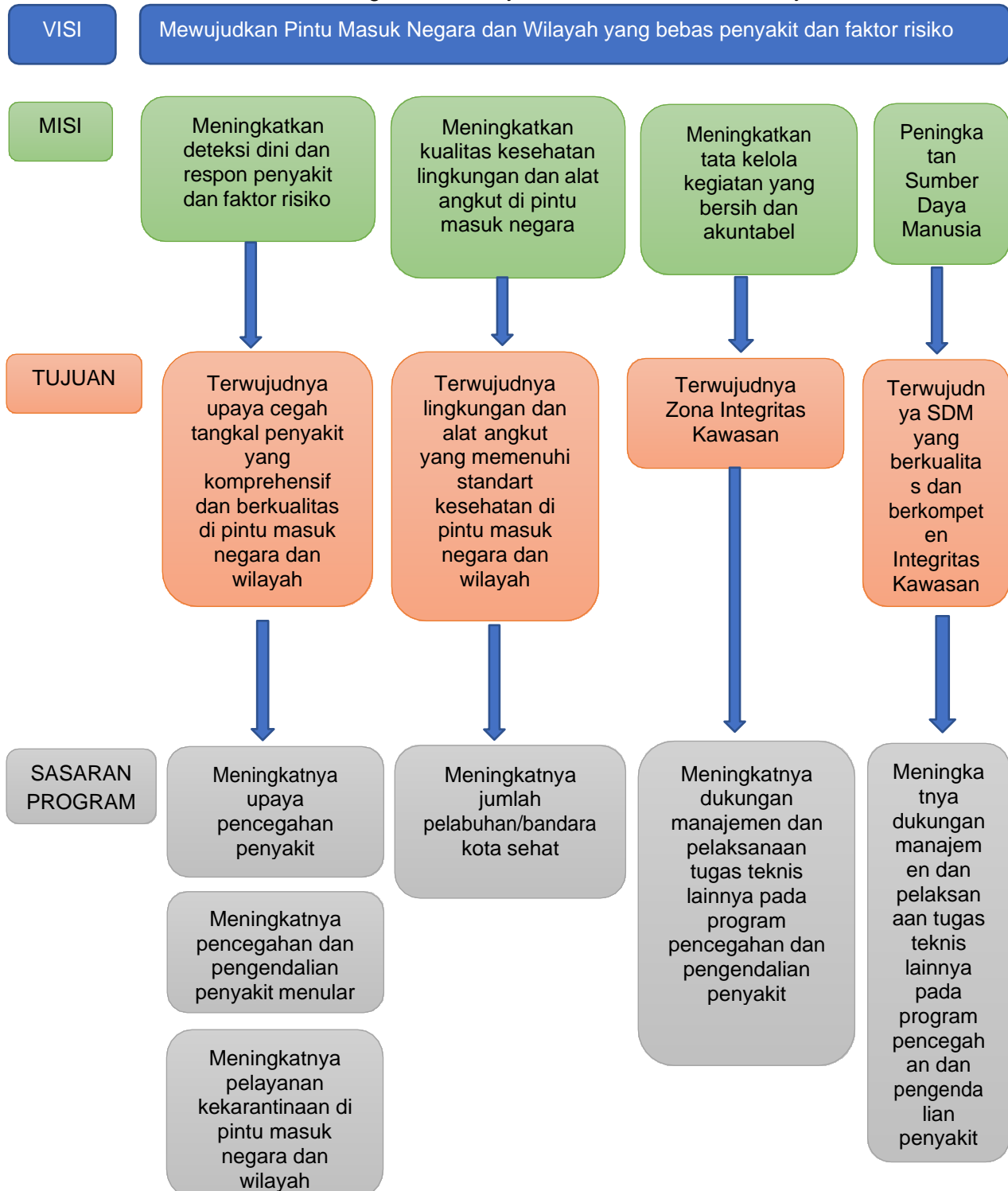
- d. Meminimalisir proses revisi DIPA dengan meningkatkan kualitas perencanaan pada saat proses penelahaan anggaran
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output
6. Untuk mencapai indikator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan strategi sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas
 - b. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas
 - c. Meningkatkan sistem pengendalian internal
7. Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
- a. Penyertaan pegawai dalam pelatihan
 - b. Koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan instansi diklat
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Training Need Analisis

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

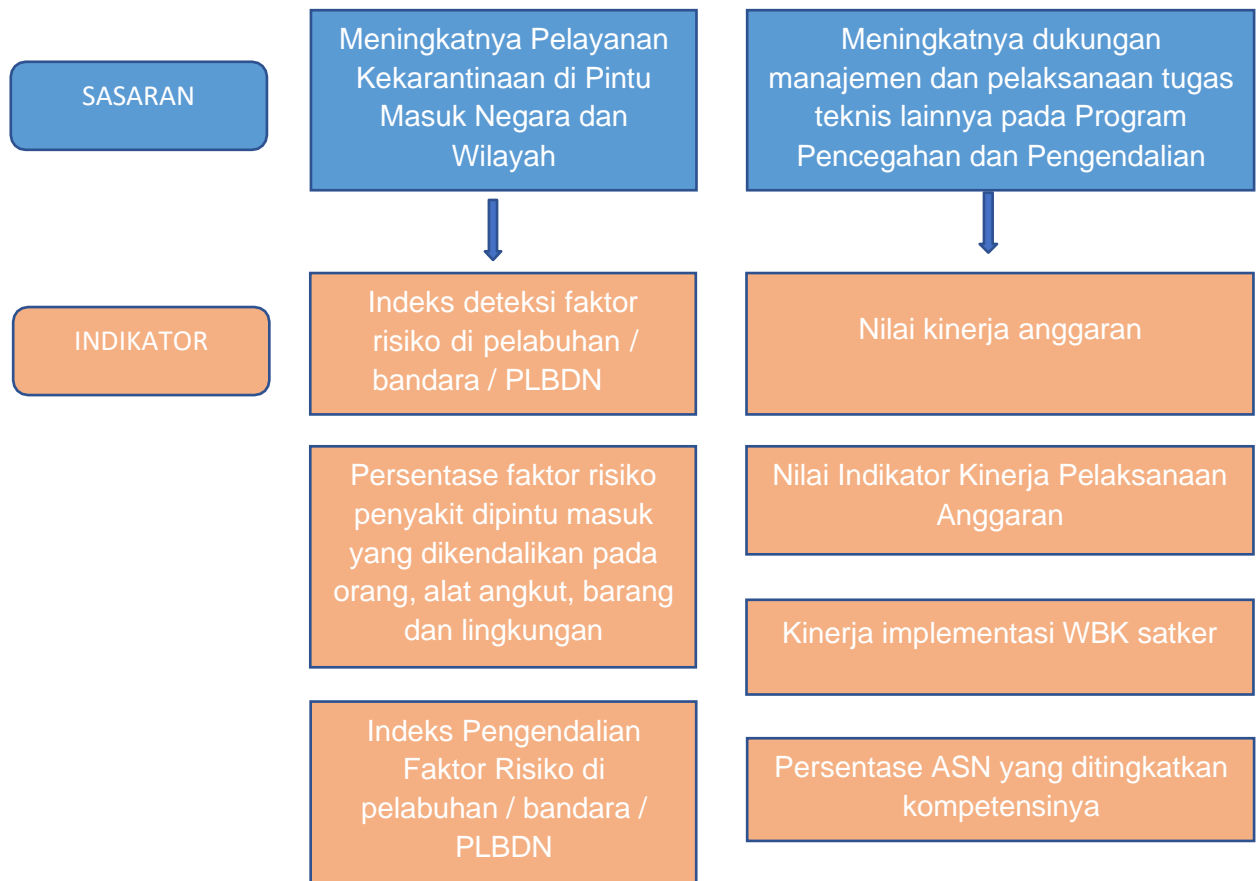
Dalam mencapai rencana Aksi Kegiatan, KKP Kelas I Batam memiliki visi dan misi serta sasaran program yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, adapun ringkasan visi misi tersebut digambarkan dalam gambar cascading dibawah ini :

Gambar 3.1 Cascading visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan



Selain memiliki visi dan misi serta sasaran program, KKP Kelas I Batam juga melaksanakan indikator kinerja kegiatan sebagai turunan dari indikator kinerja program P2P. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai tersebut :

Gambar 3.2 Cascading IKP dan IKK



B. Rencana Kegiatan

Didalam pelaksanaan kegiatan, KKP Kelas I Batam memiliki Target Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Didalam dokumen Revisi RAK ini dijabarkan target 3 tahun dikarenakan perubahan indikator dimulai dari tahun 2022.

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	0,87	0,86	0,93
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang	100%	100%	100%
3	dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	0,91	0,95	0,96
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
4	Nilai kinerja anggaran	84	84	85
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	94	95
6	Kinerja implementasi WBK satker	77	78	85
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	60%	63%	85%

Kegiatan

1. Untuk mencapai target indikator Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pelabuhan / bandara / PLBDN dilakukan kegiatan yakni:
 - 1) **Pemeriksaan orang yang diperiksa sesuai standar**, Upaya yang dilaksanakan berupa :
 - a. Rekap laporan harian
Rekap laporan harian diperoleh dari pemeriksaan penumpang dan kru pada kapal dan pesawat yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri di seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Batam.
 - b. Pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik
Pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik rutin dilakukan terlebih saat situasi pandemic COVID-19, pemeriksaan tersebut seperti : Pemeriksaan kru kapal yang akan joint, pemeriksaan guna vaksinasi

internasional (Vaksinasi Yellow Fever dan Vaksinasi Meningitis), Pemeriksaan guna penerbitan surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat pelabuhan/ bandara dalam rangka rawat jalan maupun kegawat daruratan

c. Pemeriksaan guna penerbitan ICV

Pemeriksaan yang dilakukan guna penerbitan ICV untuk legalisasi vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi internasional lainnya. Selain itu penerbitan ICV sejalan dengan pemeriksaan dan pemberian vaksinasi Meningitis/ Yellow Fever di wilayah KKP Kelas I Batam.

2) Pemeriksaan alat angkut yang diperiksa sesuai standar,

Dilakukan secara rutin setiap hari di 13 wilayah kerja (12 pelabuhan Laut dan 1 bandara). Pemeriksaan kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat) dari luar dan dalam negeri, dari luar negeri dapat tercermin melalui jumlah penerbitan dokumen COP dan PHQC untuk kapal dan Gendec untuk pesawat sedangkan dari dalam negeri tercermin dalam penerbitan PHQC.

3) Pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar

Pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar khususnya untuk jenazah, tercermin melalui jumlah dokumen surat ijin angkut jenazah (SIAJ) yang diterbitkan oleh KKP Kelas I Batam. Sebelum penerbitan SIAJ dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti Surat keterangan kematian bukan karena penyakit menular, surat pengawetan dan surat keterangan bebas Covid-19 dari Rumah Sakit, surat keterangan kremasi untuk abu jenazah. Memastikan pengepakan atau pemetian jenazah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4) Pemeriksaan lingkungan yang diperiksa sesuai standar, upaya yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan (TPP). Pemeriksaan sanitasi TPP bertujuan untuk meminimalkan faktor risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh makanan (*food borne diseases*) akibat kondisi TPP yang tidak memenuhi syarat. Jumlah pemeriksaan TPP yang dilakukan selama tahun 2022 sebanyak 350 kali.
- b. Melakukan Pemeriksaan Air Bersih. Kegiatan pemeriksaan air bersih dilakukan untuk deteksi dini faktor risiko penularan penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang tidak memenuhi syarat (*water borne*

diseases). Pemeriksaan air bersih dilakukan pada alat angkut dan pelabuhan / bandara. Pemeriksaan meliputi fisik (warna, bau, rasa) dan kimia terbatas (pH, sisa klor). Jumlah pemeriksaan air bersih selama tahun 2022 sebanyak 674 kali.

- c. Melakukan Inspeksi Sanitasi Penyediaan Air Bersih (ISPAB). Kegiatan ini berupa pemeriksaan sanitasi sarana penyediaan air bersih di pelabuhan / bandara. Jumlah pemeriksaan sarana air bersih selama tahun 2022 sebanyak 144 kali.
- d. Melakukan Pemeriksaan Sanitasi Tempat – tempat Umum (TTU). Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan kawasan TTU yang memenuhi syarat. Pemeriksaan TTU selama tahun 2022 dilakukan sebanyak 304 kali.
- e. Melakukan Kegiatan Survey Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Kegiatan survey vektor dan binatang pembawa penyakit bertujuan untuk mencegah penularan penyakit akibat vektor dan binatang pembawa penyakit. Kegiatan survey vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Kegiatan survey vektor meliputi, survey vektor DBD, survey vektor diare, survey vektor malaria sedangkan survey binatang pembawa penyakit berupa pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal. Survey vektor dan binatang pembawa penyakit selama tahun 2022 sebanyak 156 kali.

2. Untuk mencapai target indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan kegiatan yakni:

1) Tindakan Pengendalian faktor resiko alat angkut

Pengendalian faktor resiko pada alat angkut (kapal) yang dilakukan pada alat angkut (kapal) yang ditemukan adanya faktor resiko saat dilakukan pemeriksaan baik saat kedatangan maupun keberangkatan dari dalam negeri / luar negeri di semua wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Tindakan pengendalian yang dilakukan diantaranya adalah tindakan penyehatan kapal berupa desinfeksi, deratisasi dan desinseksi kapal, serta pemenuhan kelengkapan ketersediaan P3K obat didalamnya.

2) Tindakan Pengendalian faktor resiko orang

Pengendalian faktor resiko pada orang yang dimaksud adalah upaya pengendalian pada penumpang dan awak kapal baik dalam maupun luar negeri

yang dianggap beresiko seperti Suhu tinggi > 37,5, karantina, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, Hb <8.5, haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ICV palsu/exp, HIV/TB/malaria positif. Upaya pengendalian yang dilakukan adalah Rujukan bagi pelaku perjalanan yang sakit, isolasi bagi pelaku perjalanan yang positif COVID-19, tolak berangkat bagi pelaku perjalanan yang tidak laik terbang/berlayar, vaksinasi *Yellow Fever* dan meningitis, pertolongan gawat darurat, penerbitan surat izin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko dan penerbitan surat rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina).

3) Tindakan Pengendalian faktor resiko barang

Pengendalian faktor resiko pada barang yang dimaksud adalah upaya pengendalian pada Jenazah berpenyakit menular. Pada tahun 2022 tidak terdapat upaya pengendalian terhadap jenazah berpenyakit menular karena tidak ada permohonan surat izin angkut jenazah dengan penyakit menular.

4) Tindakan Pengendalian faktor resiko lingkungan

Pengendalian faktor resiko pada lingkungan yang dimaksud adalah pengendalian pada risiko lingkungan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dilakukan. Risiko lingkungan tersebut antara lain Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang tidak memenuhi syarat (kondisi fisik bangunan, makanan/minuman dan peralatan makan yang terkontaminasi mikrobiologi patogen), kualitas air bersih yang tidak memenuhi syarat (fisik, kimia, mikrobiologi).

Upaya pengendalian faktor resiko yang dilakukan pada tahun 2022 penyehatan air bersih yang terkontaminasi dengan pemberian disinfektan (klorinasi), pemberian rekomendasi perbaikan bagi pengelola TPP dan pengelola pelabuhan / bandara terkait risiko yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan penyuluhan hygiene sanitasi bagi penjamah makanan.

3. Untuk mencapai target indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan /bandara / PLBDN dilakukan kegiatan yakni :

1) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%

Untuk mencapai target indikator Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% dilakukan upaya penyelidikan epidemiologi setelah mendapat adanya laporan ditemukan kasus

suspek COVID-19 pada pelaku perjalanan dan Jemaah haji, evakuasi kasus positif COVID-19 ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit karantina, verifikasi rumor kejadian kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak (GG-APA) ke RSBP Batam dan RSBK, Koordinasi dan kolaborasi dengan dinas Kesehatan Kota Batam dan BTKLPP Batam dalam investigasi kasus dan tracing kontak erat COVID-19, Diseminasi laporan kasus ke PHEOC, Subdit Surveilans dan Karantina Kesehatan, Dinkes Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kepri terkait penyediaan rumah sakit rujukan dan tempat karantina dan isolasi kasus COVID-19.

2) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1

Melakukan Kegiatan Survei dan Pengendalian Vektor PES. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemetaan, persiapan alat dan bahan, pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal. Kegiatan dilaksanakan di area perimeter Pelabuhan dan bandar udara. Persentase indeks pinjal < 1 di semua pelabuhan / bandara selama tahun 2022 sebesar 100%.

3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (< 1)

Melakukan Kegiatan Survei Vektor Malaria. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey jentik dan nyamuk dewasa Anopheles sp di area perimeter dan buffer Pelabuhan Teluk Senimba, Pelabuhan Nongsa Terminal Bahari, Pelabuhan Telaga Punggur dan Bandar udara Hang Nadim. Persentase pelabuhan / bandara yang tidak ditemukan larva Anopheles sp di semua wilayah kerja pada tahun 2022 sebesar 100%.

4) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2

Kegiatan layanan survei vektor kecoa dilakukan di semua wilayah kerja. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey kepadatan kecoa di area perimeter Pelabuhan dan bandar udara. Persentase pelabuhan/ bandara dengan indeks populasi kecoa < 2 di wilayah kerja KKP Kelas I Batam pada tahun 2022 sebesar 100%.

5) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2

Kegiatan layanan survei vektor diare dilakukan di semua wilayah kerja. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey kepadatan lalat di area perimeter Pelabuhan dan bandar udara. Persentase

pelabuhan/bandara dengan indeks populasi lalat <2 di wilayah kerja KKP Kelas I Batam pada tahun 2022 sebesar 100%.

6) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 Melakukan Kegiatan Survei dan Pengendalian Vektor DBD. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey jentik *Aedes sp*, larvasidasi dan pengasapan (fogging) di area perimeter dan buffer Pelabuhan dan bandar udara. Persentase HI perimeter 0 di semua pelabuhan / bandara selamatahun 2022 sebesar 100%

7) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

HI buffer <1 selama tahun 2022 sebesar 23%. HI buffer yang belum mencapai 100% dikarenakan kurangnya SDM pelaksana kegiatan untuk lokasi buffer pelabuhan / bandara.

8) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan kawasan TTU yang memenuhi syarat. Kegiatan pemeriksaan sanitasi TTU berupa pengawasan sanitasi lingkungan dan sanitasi bangunan yang ada di area pelabuhan / bandara. Pemeriksaan sanitasi Tempat – tempat Umum dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Persentase TTU yang memenuhi syarat di wilayah kerja KKP Kelas I Batam selama tahun 2022 sebesar 100%.

9) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

Melakukan Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan faktor risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh makanan (*food borne diseases*) akibat kondisi TPP yang tidak memenuhi syarat. Upaya pengendalian faktor risiko yang ditemukan pada saat pemeriksaan sanitasi yang telah dilakukan adalah memberikan rekomendasi perbaikan terkait risiko yang ditemukan kepada pengelola pelabuhan dan pengelola TPM dan melakukan *follow up* tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan serta melakukan penyuluhan kepada penjamah makanan. Persentase TPP memenuhi laik hygiene di wilayah kerja KKP Kelas I Batam di wilayah kerja KKP Kelas I Batam selama tahun 2022 sebesar 100%.

10) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Kegiatan ini dilakukan pada lokus kualitas air bersih yang ditemukan faktor risiko pada saat pemeriksaan dan dilakukan pengendalian berupa upaya penyehatan air sampai dengan memenuhi syarat kesehatan. Pemeriksaan kualitas air bersih dikategorikan memenuhi syarat apabila semua hasil pemeriksaan mikrobiologi sebanyak 6 kali dan kimia lengkap sebanyak 2 kali memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Kualitas air bersih yang ditemukan faktor risiko pada tahun 2022 sebanyak 1 lokus dan telah dilakukan pengendalian sampai dengan memenuhi syarat. Persentase lokus kualitas air bersih

4. Untuk mencapai target indikator Nilai Kerja Anggaran dilakukan kegiatan berikut :

1. Penyerapan anggaran

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran setiap bulan
- b. Mengevaluasi dan menjadwalkan ulang kegiatan yang belum dapat direalisasikan
- c. Mengoptimalkan proses pembayaran dengan mekanisme LS

2. Konsistensi

- a. Melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana penarikan Dana (RPK/RPD) di awal tahun anggaran
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan
- c. Menyusun revisi RPK dan RPD untuk kegiatan – kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Optimalisasi

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tagihan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kecukupan pagu anggaran untuk suatu kegiatan dan melakukan optimalisasi atas sisa pagu anggaran

5. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan kegiatan berikut :

1) Revisi DIPA

- a. Melakukan review atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal

- diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.
 - c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.

2) Deviasi Halaman III DIPA

- a. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- b. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Halaman III DIPA.
- c. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

3) Penyerapan Anggaran

- a. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- b. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

4) Belanja Kontraktual

- a. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
- b. Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
- c. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.

5) Penyelesaian Tagihan

- a. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
- b. Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
- c. Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP.
- d. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahkan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.

6) Pengelolaan UP dan TUP

- a. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
- b. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- c. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- d. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- e. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detail data IKPA UP/TUP).

7) Dispensasi SPM

- a. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- b. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- c. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

6. Untuk mencapai target Kinerja Implementasi WBK dilakukan kegiatan berikut :

- 1) Persiapan Dokumen Pengungkit dan Persiapan persiapan WBK / WBM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam melaksanakan kegiatan terkait persiapan satker menuju WBK dibawah bimbingan tim Itjen Kementerian Kesehatan.

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZonaIntegritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) meliputi Tim I Manajemen Perubahan, Tim II Penataan Tata Laksana, Tim III Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim IV Penguatan Akuntabilitas, Tim V Penguatan Pengawasan dan Tim VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil evaluasi self assesment oleh Sekretariat Ditjen P2P Kementerian Kesehatan terhadap pemenuhan indikator WBK pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam didapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi sebesar 85,67%, dimana nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut ; Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan & Aspek Reform) 83,18%, dan Komponen Hasil (Birokrasi yang bersih dan akuntabel & Pelayanan publik yang prima) 89,40%.

2) Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah menyusun Laporan Kinerja yang merupakan hasil pelaksanaan rencana aksi kegiatan lima tahun, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap semua permasalahan. Selanjut nya hasil laporan kinerja tersebut dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan memperoleh penilaian akuntabilitas kinerja, dengan memperoleh penilaian SAKIP 72,25.

7. Untuk mencapai target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan kegiatan berikut :

- a. Peningkatan Kompetensi (Pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan / konsultasi Jabfung)
Workshop Penyusunan Angka Kredit Fungsional, Pelatihan Lakip & Sakip, Diklat Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Dasar, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Jenjang Ahli
- b. Peningkatan Kapasitas SDM
Seminar Ilmiah Kedokteran, Pemanfaatan Nyamuk Ber Walbachia, Prevensi Penyakit Infeksi, Pengendalian terpadu vektor n reservoir, Biomolekuler Vektor Dan Upaya Pengendaliannya, Pengawasan Binatang Pengerat Dan Pencegahan Leptospirosis, Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).
- c. Peningkatan kualitas SDM sesuai Kualifikasi lain
Literasi Digital, Pelatihan Leadership dan Teamwork, Webiner Hakordia dan peningkatan kapasitas lainnya dilaksanakan melalui webinar online

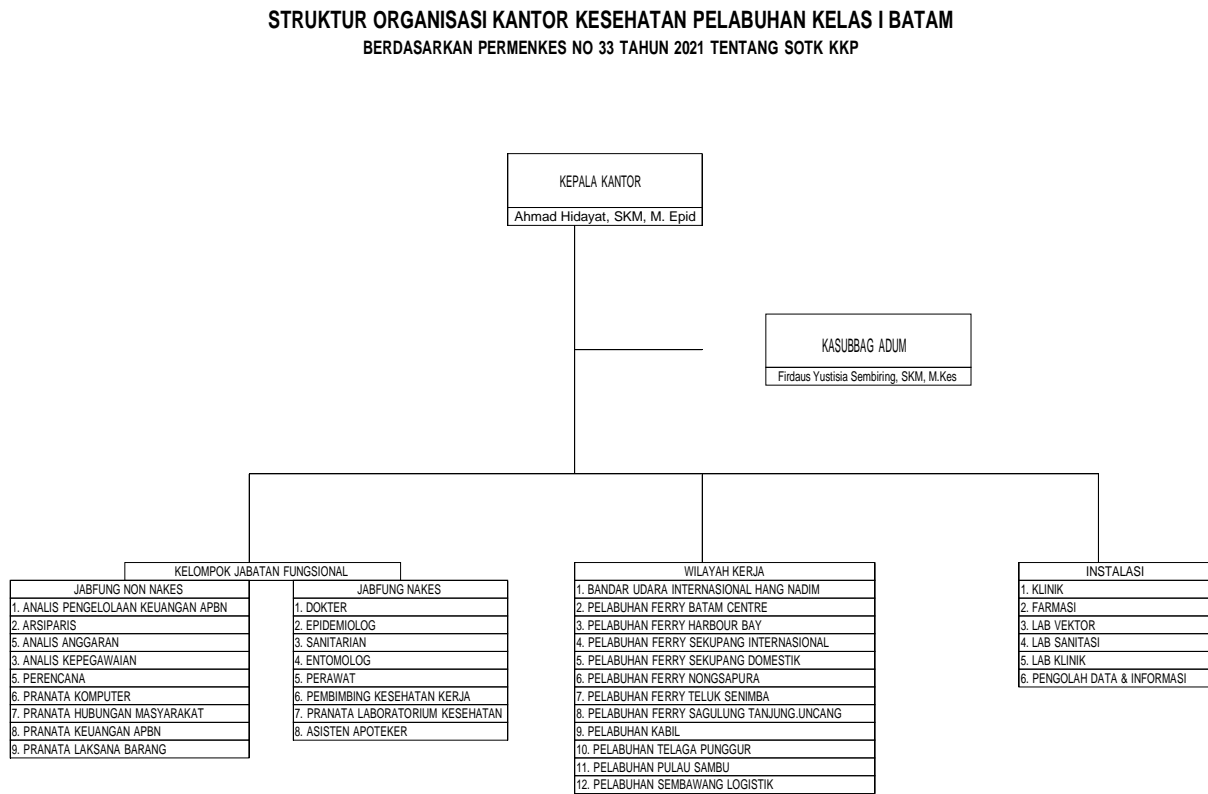
C. Kerangka Kelembagaan

Sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 terdapat susunan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai berikut:

Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam di klasifikasikan menjadi kelas I dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- A. Kepala Kantor
- B. Subbagian Administrasi Umum
- C. Instalasi
 - a. Instalasi Klinik
 - b. Instalasi Farmasi
 - c. Instalasi Laboratorium Vektor
 - d. Instalasi Laboratorium Sanitasi
 - e. Instalasi Data dan Informasi
- D. Wilayah Kerja (12 Wilayah Kerja)
 - a. Bandara Internasional Hang Nadim
 - b. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang
 - c. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang
 - d. Pelabuhan Laut Pulau Sambu
 - e. Pelabuhan Laut Nongsa
 - f. Pelabuhan Laut Kabil
 - g. Pelabuhan Laut Telaga Punggur
 - h. Pelabuhan Laut Ferry Batam Center
 - i. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung
 - j. Pelabuhan Laut Teluk Senimba
 - k. Pelabuhan Laut Semblog
 - l. Pelabuhan Laut Ferry Harbour Bay
- E. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam



D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk *Standar Operating Procedur (SOP)* yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular
2. Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran-Negara Nomor 59 Tahun 2015);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
12. Surat Edaran Kepala Satgas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada masa pandemic COVID-19
13. Surat Edaran Kepala Satgas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada masa pandemic COVID-19

E. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
1.	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di pelabuhan / bandara / PLBDN	3.631.853.000	5.337.831.000	5.337.831.000	Substansi : PKSE, UKLW, PRL
2.	Persentase faktor risiko penyakit	2.980.753.000	908.227.000	908.227.000	Substansi : PKSE,

	dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan				UKLW, PRL
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara / PLBDN	540.030.000	156.362.000	156.362.000	Substansi : PKSE, UKLW, PRL
4.	Nilai kinerja anggaran	19.433.754.000	35.192.000	35.192.000	Substansi : Tata Usaha
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	30.658.116.000	80.596.000	80.596.000	Substansi : Tata Usaha
6.	Kinerja implementasi WBK satker	151.986.000	12.144.000	12.144.000	Substansi : Tata Usaha
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	584.316.000	1.236.620.000	1.236.620.000	Substansi : Tata Usaha, UKLW, PKSE, PRL

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

1. Pemantauan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan melalui rapat bulanan monitoring realisasi anggaran dan realisasi kegiatan. Penilaian dilakukan dengan menilai kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dan juga rencana pencairan dana (RPD) dengan realisasi pencairan dana. RPK dan RPD sebagai acuan pemantauan disusun diawal tahun untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi baik RPK maupun RPD maka dilakukan revisi per triwulan.

2. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat bulanan. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di KKP Kelas I Batam baik pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Lingkup evaluasi ini diantaranya berupa memantau capaian realisasi kegiatan dan capaian anggaran setiap bulan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi baik RPK maupun RPD maka dilakukan percepatan kegiatan untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Evaluasi kegiatan juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program khususnya kegiatan pengawasan orang, barang dan alat angkut di pelabuhan dan bandara. Evaluasi ini juga bertujuan untuk sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan yang mungkin dilakukan dengan instansi lain di pelabuhan dan bandara baik pemerintah maupun swasta.

3. Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran di KKP Kelas I Batam sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dan seluruh kegiatan merupakan Perjanjian Kinerja yang harus dicapai. Guna memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, pengendali kegiatan melakukan pengorganisasian, manajemen, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Jika ditemukan permasalahan, maka pengendali kegiatan akan melakukan evaluasi, revisi atau reorganisasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB V

PENUTUP

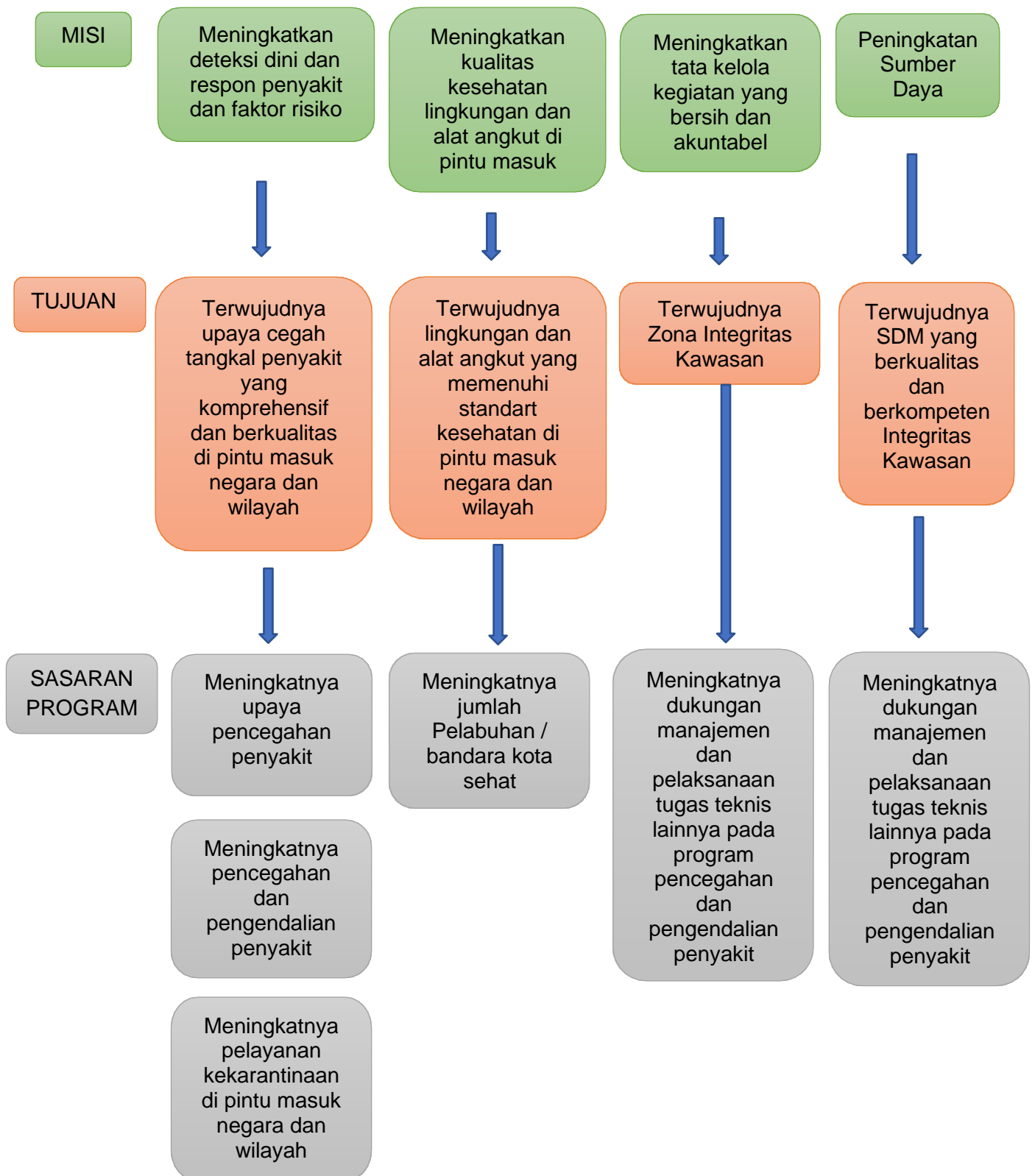
Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, KKP Kelas I Batam mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

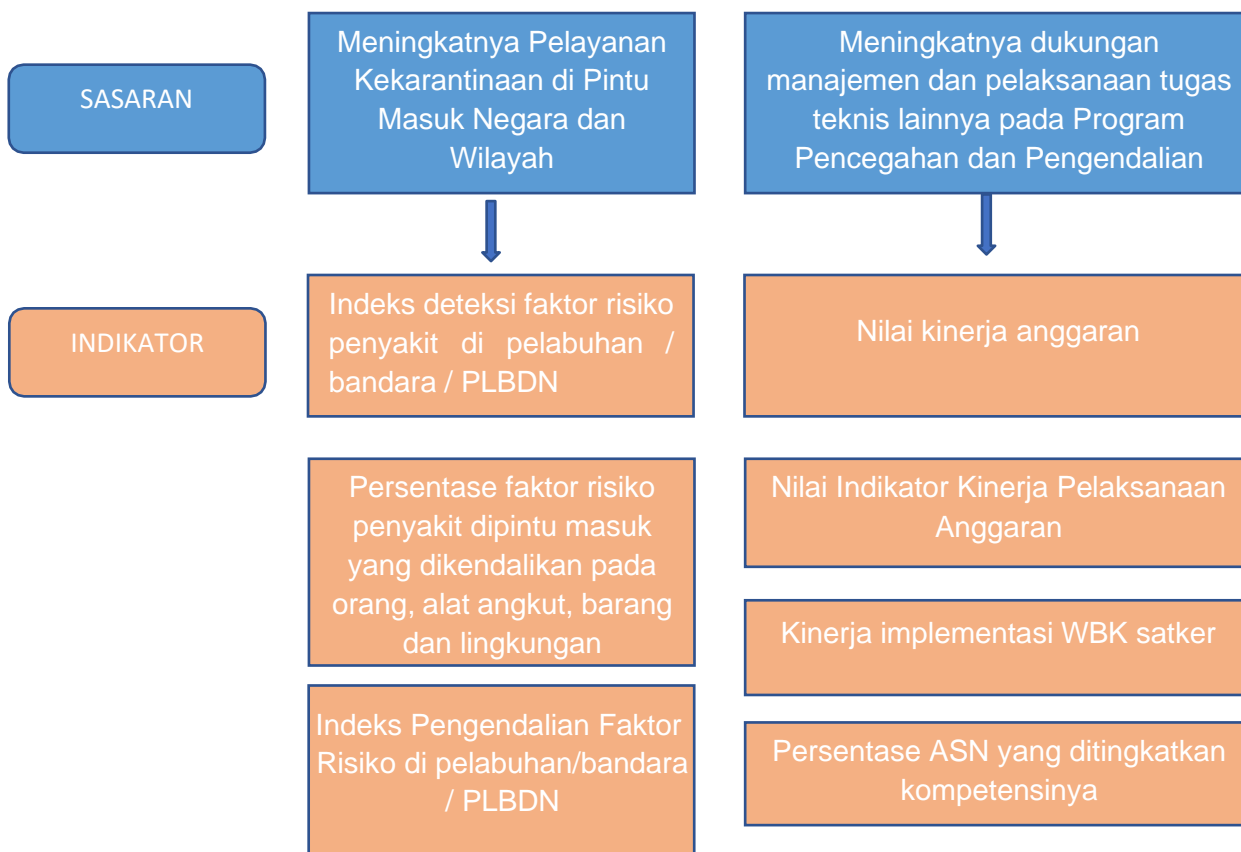
Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 2020-2024, dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan KKP Kelas I Batam dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagai wujud dari pelaksanaan 6 Pilar kesehatan dalam hal ini Pilar ke 3 yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan : Respon cepat dalam menghadapi KLB/wabah/kedaruratan kesehatan masyarakat; Penguatan surveilans dan sistem penanganan bencana serta kedaruratan kesehatan. Juga untuk mendukung pelaksanaan Pilar ke 5 yaitu Transformasi SDM Kesehatan : Jaminan ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan dan Pilar ke 6 yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan : Integrasi dan pengembangan sistem data, aplikasi dan ekosistem kesehatan.

Lampiran 1 Kerangka Logis Program

Gambar 1.1 Cascading visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan



Gambar 1.2 Cascading IKP dan IKK



Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan (dimasukkan semua indicator dari awal sampai revisi)

IKK	Target					Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	0	0	0,87	0,86	0,92	16.128.334.000	1.182.601.000	3.631.853.000	5.337.831.000	5.337.831.000
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	3.675.042.000	4.147.909.000	2.980.753.000	908.227.000	908.227.000
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	0,85	0,90	0,91	0,95	0,96	767.545.000	1.146.658.000	540.030.000	156.362.000	156.362.000
Nilai kinerja anggaran	80	83	84	84	85	564.394.000	16.136.993.000	19.433.754.000	35.192.000	35.192.000
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	93	93	94	95	453.210.000	122.540.000	30.658.116.000	80.596.000	80.596.000
Kinerja implementasi WBK satker	70	75	77	78	85	200.379.000	108.351.000	151.986.000	12.144.000	12.144.000
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	55%	60%	63%	65%	508.592.000	432.127.000	584.316.000	1.236.620.000	1.236.620.000

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/PLBDN	Mengukur kinerja deteksi dini factor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Range indeks 0-1 2. Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) 3. Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) <p>Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pemeriksaan orang 2. Laporan pemeriksaan alat angkut 3. Laporan pemeriksaan barang 4. Laporan pemeriksaan lingkungan
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pemeriksaan orang 2. Laporan pemeriksaan alat angkut 3. Laporan pemeriksaan barang 4. Laporan pemeriksaan lingkungan

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persentase target dan capaian: 1. Kelengkapan data surveilans 2. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam 3. Penyusunan dokumen renkon yang baru 4. (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reuiu) berdasarkan pintu masuk negara 5. Indeks pinjal ≤ 1 (pelabuhan/ bandara) 6. HI perimeter = 0 (pelabuhan/ bandara) 7. Tidak ditemukan larva anopheles(pelabuhan/ bandara) 8. Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/ bandara) 9. Kepadatan lalat <2 (pelabuhan/ bandara) 11. TTU memenuhi syarat (titik) 12. TPM layak higiene (titik) 13. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik) 14. Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan 15. dan dibagi 11 dikali 100%	4. Laporan surveilans 5. Laporan SKD KLB/PE/Verifikasi Rumor 6. Dokumen renkon 7. Laporan pemeriksaan vektor 8. Laporan Pemeriksaan lingkungan
Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	1. E Monev DJA (dashboard)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Penghitungan bobot dari 8 parameter yakni revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	<ol style="list-style-type: none"> 1. OMSPAN 2. E Monev DJA
Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penilaian Bagian Hukormas 2. Aplikasi Sipinal
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Perhitungan 2. Laporan peningkatan kapasitas ASN

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	<p>a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor dan lintas program</p> <p>b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana deteksi dini</p> <p>d. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi</p>	<p>13 wilker :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Ampar 2. Batam Center 3. Harbour Baya 4. Hang Nadim 5. Nongsa 6. Sekupang Domestik 7. Sekupang Internasional 8. Telaga Punggur 9. Teluk Senimba 10. Sagulung 11. Kabil 12. Semblog 13. Pulau Sambu 	<p>2022 : 4 wilker (Wilker Pelabuhan Batu Ampar, Batam Centre, Harbour Bay, dan Bandara Hang Nadim)</p> <p>2023 : 4 wilker (wilker Nongsa, Sekupang domestik, Telaga Punggur dan Teluk Senimba)</p> <p>2024 : 5 wilker (wilker Sagulung, Sekupang International, Kabil, Semblog dan Pulau Sambu)</p>	Koordinasi LP/LS	3.631.853.000
2		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut,	a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program	<p>13 wilker :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Ampar 2. Batam Center 3. Harbour Baya 4. Hang Nadim 	2022 : 4 wilker (Wilker Pelabuhan Batu Ampar, Batam Centre, Harbour Bay, dan	Koordinasi LP/LS	2.980.753.000

	barang dan lingkungan	<p>b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko</p>	<p>5. Nongsa</p> <p>6. Sekupang Domestik</p> <p>7. Sekupang Internasional</p> <p>8. Telaga Punggur</p> <p>9. Teluk Senimba</p> <p>10. Sagulung</p> <p>11. Kabil</p> <p>12. Semblog</p> <p>13. Pulau Sambu</p>	<p>Bandara Hang Nadim)</p> <p>2023 : 4 wilker (wilker Nongsa, Sekupang domestik, Telaga Punggur dan Teluk Senimba)</p> <p>2024 : 5 wilker (wilker Sagulung, Sekupang International, Kabil, Semblog dan Pulau Sambu)</p>		
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	<p>a. Peningkatan Inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit serta faktor resiko.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program</p> <p>c. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko</p>	<p>13 wilker :</p> <p>1. Batu Ampar</p> <p>2. Batam Center</p> <p>3. Harbour Baya</p> <p>4. Hang Nadim</p> <p>5. Nongsa</p> <p>6. Sekupang Domestik</p> <p>7. Sekupang Internasional</p> <p>8. Telaga Punggur</p> <p>9. Teluk Senimba</p> <p>10. Sagulung</p> <p>11. Kabil</p> <p>12. Semblog</p>	<p>2022 : 4 wilker (Wilker Pelabuhan Batu Ampar, Batam Centre, Harbour Bay, dan Bandara Hang Nadim)</p> <p>2023 : 4 wilker (wilker Nongsa, Sekupang domestik, Telaga Punggur dan Teluk Senimba)</p> <p>2024 : 5 wilker (wilker Sagulung, Sekupang</p>	Koordinasi LP/LS	540.030.000

				13. Pulau Sambu	International, Kabil, Semblog dan Pulau Sambu)		
4	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan anggaran c. Melakukan rekonsiliasi atas realiasi APBN d. Monitoring evaluasi antara rencana penarikan dan realisasi penarikan dana 	1 Lokus (Kantor Induk)	2022 : Kantor Induk 2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	Monev Bulanan	19.433.754.000
5		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi pagu anggaran kontraktual b. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan penyediaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan c. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tagihan APBN d. Meminimalisir proses revisi DIPA dengan meningkatkan kualitas 	1 Lokus (Kantor Induk)	2022 : Kantor Induk 2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	Monev Bulanan	30.658.116.000

			<p>perencanaan pada saat proses penelahaan anggaran</p> <p>e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output</p>				
6	Kinerja implementasi WBK satker	<p>a. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas</p> <p>b. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas</p> <p>c. Meningkatkan sistem pengendalian internal</p>	1 Lokus (KKP Kelas I Batam)	<p>2022 : KKP Kelas I Batam</p> <p>2023 : KKP Kelas I Batam</p> <p>2024 : KKP Kelas I Batam</p>	Monev Bulanan	151.986.000	
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	<p>a. Penyertaan pegawai dalam pelatihan</p> <p>b. Koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan instansi diklat</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Training Need Analisis</p>	1 Lokus (Kantor Induk)	<p>2022 : Kantor Induk</p> <p>2023 : Kantor Induk</p> <p>2024 : Kantor Induk</p>	Penyertaan pegawai dalam pelatihan dan Monev pegawai	584.316.000	